

Strategi Dan Tantangan Budaya Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Demokrasi Di Tingkat Desa

Immanuel Natoralemba Tadanugi

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sintuwu Maroso

e-mail: nueltadanugi@gmail.com

Published: December , 2025

ABSTRAK

Penguatan demokrasi di tingkat desa menghadapi tantangan signifikan berupa budaya politik parokial dan praktik transaksional yang merusak rasionalitas pemilih. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penghambat sosiokultural dan ekonomi serta merumuskan strategi penguatan partisipasi demokrasi melalui modal sosial, kepemimpinan, dan literasi politik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi pustaka, di mana data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi budaya parokial dan politik uang dapat dimitigasi melalui penguatan modal sosial berbasis kepercayaan dan norma. Keberhasilan praktik politik non-transaksional di beberapa wilayah membuktikan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa yang demokratis dan implementasi literasi politik secara holistik efektif meningkatkan keterlibatan aktif warga dalam pembangunan. Kesimpulannya, transformasi dari budaya parokial menuju budaya partisipan memerlukan sinergi antara integritas pemimpin, pemberdayaan masyarakat melalui literasi yang masif, serta transparansi tata kelola desa guna menciptakan ekosistem demokrasi lokal yang berkelanjutan dan akuntabel.

Keywords: budaya politik, demokrasi, desa, literasi politik, partisipasi.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memegang peranan krusial sebagai fondasi utama dalam penguatan demokrasi serta keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia. Eksistensi demokrasi di tingkat lokal ini sangat dipengaruhi oleh budaya politik, yang didefinisikan sebagai pola perilaku, nilai, dan orientasi masyarakat yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan evaluative terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pengambilan keputusan kolektif (Almond & Verba, 1963; Surbakti, 1992).

Secara teoretis, partisipasi aktif warga dalam proses politik bukan sekadar kewajiban elektoral untuk memberikan suara, melainkan instrumen vital untuk memperkuat ikatan sosial, kepercayaan (trust), dan akuntabilitas pemerintah guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Putnam, 2000; Mardikanto dkk., 2013). Namun, realitas demokrasi Indonesia pasca-reformasi menunjukkan tantangan signifikan berupa pergeseran orientasi politik dari yang semula bersifat ideologis menjadi lebih pragmatis dan transaksional (Aspinall & Berenschot, 2019; Fossati et al., 2020).

Fenomena ini sering kali diperburuk oleh dominasi budaya politik parokial di wilayah pedesaan, di mana rendahnya tingkat literasi politik serta kuatnya pola hubungan patronase dan praktik politik uang menghambat terciptanya partisipasi yang bermakna dan berbasis pada substansi kebijakan. Oleh karena itu, memahami dinamika budaya politik dan merumuskan strategi penguatan partisipasi di tingkat desa menjadi urgensi akademik untuk menyelamatkan kualitas demokrasi dari jebakan pragmatisme jangka pendek demi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Implementasi demokrasi di tingkat desa saat ini menghadapi tantangan serius akibat dominasi budaya politik parokial, di mana masyarakat cenderung memiliki kesadaran politik yang sangat rendah dan tidak terlibat secara bermakna dalam sistem politik selain dari sekadar mengikuti instruksi otoritas lokal. Masalah ini diperburuk oleh meluasnya praktik politik uang dan pola hubungan patronase (klientelisme) yang telah menggeser orientasi demokrasi menjadi bersifat transaksional; pilihan politik warga sering kali didasarkan pada iming-iming materi dan kedekatan personal daripada pemahaman substansial terhadap visi dan misi calon pemimpin (Aspinall & Berenschot, 2019;). Selain itu, hambatan sosial dan struktural masih menjadi kendala signifikan dalam menciptakan demokrasi yang inklusif, tercermin dari rendahnya representasi perempuan dalam struktur pemerintahan desa yang hanya mencapai sekitar 20% akibat kuatnya norma sosial yang membatasi peran publik mereka.

Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan adanya kesenjangan literasi politik serta resistensi budaya terhadap transformasi digital, di mana keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pemahaman digital menghambat efektivitas partisipasi serta transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa. Tanpa strategi penguatan yang komprehensif, akumulasi tantangan ini akan terus melanggengkan apatisme masyarakat dan menurunkan legitimasi proses demokrasi di tingkat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap faktor-faktor sosiokultural dan ekonomi yang menghambat partisipasi demokrasi di tingkat desa, dengan fokus khusus pada resistensi terhadap budaya politik parokial dan praktik demokrasi transaksional. Investigasi ini mencakup identifikasi akar penyebab rendahnya kesadaran politik warga serta pengaruh meluasnya pola hubungan patronase dan politik uang yang cenderung merusak rasionalitas pemilih dalam kontestasi lokal (Almond & Verba, 1963; Aspinall & Berenschot, 2019). Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas berbagai strategi penguatan partisipasi, termasuk optimalisasi modal sosial yang terdiri dari kepercayaan (trust), norma, dan jaringan sebagai instrumen untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap pengaruh materiil (Putnam, 2000; Syahir dkk., 2023).

Lebih lanjut, studi ini mengevaluasi peran strategis kepemimpinan kepala desa yang demokratis serta implementasi literasi politik dalam mendorong keterlibatan warga yang lebih inklusif, terutama bagi kelompok perempuan yang partisipasinya sering kali dibatasi oleh norma sosial dan struktural (Rati dkk., 2017; Darajat & Muhtadi, 2020; Iskandar, 2023). Melalui pendekatan ini, tujuan akhir dari penelitian ini adalah merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret dan inovatif bagi pemerintah desa untuk menciptakan ekosistem demokrasi lokal yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada substansi kebijakan demi keberlanjutan pembangunan nasional.

Meskipun literatur saat ini telah banyak mengeksplorasi tantangan demokrasi di tingkat lokal, terdapat fragmentasi yang signifikan dalam kajian strategi penguatan partisipasi masyarakat desa. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus secara terpisah pada isu praktik klientelisme dan politik uang (Aspinall & Berenschot, 2019; Suwarsono, 2025), hambatan gender dalam struktur pemerintahan (Saputri, 2022), atau efektivitas modal sosial sebagai benteng pertahanan terhadap politik transaksional (Syahir dkk., 2023).

Di sisi lain, kajian mengenai literasi politik umumnya masih terbatas pada pendekatan sosiokultural tradisional dan kearifan lokal tanpa mengintegrasikannya dengan instrumen modern (Darajat & Muhtadi, 2020). Terdapat celah penelitian yang nyata dalam mengeksplorasi sinergitas antara penguatan modal sosial berbasis kepercayaan (trust) dan norma masyarakat dengan pemanfaatan teknologi digital melalui e-government untuk meningkatkan transparansi serta partisipasi warga (Desa Panimbang, 2025).

Hingga kini, belum banyak studi yang merumuskan model integratif yang menggabungkan kepemimpinan demokratis, literasi politik yang masif, dan keterbukaan digital sebagai strategi holistik untuk merobohkan dominasi budaya politik parokial yang masih mengakar dalam proses deliberasi desa seperti Musrenbang (Murdianto dkk., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menawarkan pendekatan komprehensif yang menyatukan elemen tradisional dan modern dalam meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat desa.

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan holistik yang menyatukan dimensi modal sosial dengan transformasi budaya politik di tingkat pedesaan sebagai antitesis terhadap praktik demokrasi transaksional. Orisinalitas kajian ini terletak pada pengadopsian teori modal sosial yang mencakup kepercayaan (trust), norma, dan jaringan sebagai instrumen fundamental untuk

membangun ketahanan masyarakat terhadap penetrasi politik uang yang selama ini mendominasi kontestasi lokal (Putnam, 2000; Syahir dkk., 2023).

Berbeda dengan studi sebelumnya yang sering memisahkan aspek sosiokultural dari struktur formal, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana sinergi antara kepemimpinan demokratis kepala desa dan strategi literasi politik informal dapat secara efektif menggeser budaya politik parokial menjadi partisipan (Darajat & Muhtadi, 2020; Saputri, 2022; Rati dkk., 2017).

Lebih lanjut, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dengan merumuskan model "piloting point" bagi dinamika kekuasaan non-transaksional, yang mengintegrasikan penguatan deliberasi publik dalam Musrenbang dengan transparansi tata kelola desa berbasis swadaya (Syahir dkk., 2023; Murdianto dkk., 2025). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah teoretis mengenai penguatan demokrasi akar rumput, tetapi juga menawarkan paradigma baru dalam menciptakan ekosistem politik lokal yang berkelanjutan dan berbasis pada integritas modal sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih untuk melakukan analisis mendalam terhadap dinamika hubungan antar fenomena serta penarikan kesimpulan secara logis berdasarkan literatur yang relevan. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menghimpun berbagai teori, prinsip, dan gagasan yang dapat digunakan sebagai landasan analisis untuk menjawab permasalahan strategi dan tantangan budaya politik di tingkat desa.

Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder. Data tersebut mencakup literatur ilmiah yang terdiri dari buku-buku teks, jurnal penelitian, dokumen resmi pemerintah, surat kabar, serta artikel yang tersedia di basis data akademik. Secara spesifik, penelitian ini merujuk pada regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta teori-teori fundamental dari para ahli seperti Almond dan Verba (1963/1990) mengenai budaya politik dan Putnam (2000) terkait modal sosial.

Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian kata kunci terkait "budaya politik desa", "partisipasi demokrasi", dan "strategi literasi politik" pada berbagai pangkalan data digital dan perpustakaan. Seluruh informasi yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian guna memperkuat basis argumentasi.

Kriteria Pemilihan Literatur Literatur yang dipilih dalam kajian ini harus memenuhi kriteria inklusi tertentu, yaitu: (1) karya ilmiah yang membahas partisipasi politik dan demokrasi di tingkat lokal atau desa; (2) literatur yang mengeksplorasi hambatan struktural dan sosiokultural dalam politik desa; dan (3) sumber-sumber tepercaya yang memberikan data statistik atau temuan empiris mengenai dinamika politik di Indonesia.

Peneliti mengutamakan literatur terbitan terbaru serta karya-karya klasik yang menjadi standar dalam ilmu politik guna menjamin validitas teoretis

Data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat interpretatif dan komprehensif. Proses analisis mengikuti model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, di mana informasi mentah disaring dan difokuskan; penyajian data (data display), di mana temuan disusun secara sistematis; dan penarikan kesimpulan atau verifikasi untuk mengonfirmasi keabsahan temuan dengan teori-teori yang digunakan. Teori budaya politik parokial, subjek, dan partisipan digunakan sebagai kerangka analisis (tools of analysis) untuk mengevaluasi data literatur yang ditemukan.

Prosedur atau Tahapan Penelitian Prosedur penelitian ini dibagi ke dalam empat tahap sistematis: Tahap Identifikasi; Tahap Inventarisasi Literatur; Tahap Evaluasi dan Analisis; Tahap Sintesis dan Pelaporan.

HASIL

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interpretatif dan komprehensif melalui tiga tahapan utama sesuai model Miles dan Huberman (1994). Tahap pertama, reduksi data, dilakukan dengan menyaring informasi dari berbagai studi kasus desa di Indonesia, seperti Desa Mane Kareung,

Ciwaringin, Ngadas, Panimbang, dan Karampuang untuk memfokuskan pada variabel tantangan budaya politik dan strategi penguatan demokrasi. Tahap kedua, penyajian data (data display), mengorganisir temuan ke dalam kategorisasi tipologi budaya politik, hambatan partisipasi, dan efektivitas strategi intervensi untuk mempermudah penarikan Kesimpulan.

Pemetaan Tipologi Budaya Politik di Tingkat Desa

Berdasarkan tinjauan literatur, profil budaya politik di pedesaan Indonesia menunjukkan spektrum yang beragam, yang dianalisis menggunakan kerangka teori Almond dan Verba (1963/1990)

- a. Budaya Politik Parokial dan Tantangan Transaksional: Temuan di Desa Ciwaringin menunjukkan dominasi budaya parokial di mana kesadaran politik warga sangat rendah. Partisipasi di wilayah ini cenderung terdistorsi oleh praktik politik uang (money politics) atau "serangan fajar". Masyarakat memilih pemimpin berdasarkan iming-iming materiil atau kedekatan personal tanpa memahami visi dan misi calon pemimpin. Fenomena serupa ditemukan di Desa Karampuang, di mana rendahnya tingkat pendidikan (76% tidak tamat SD) berkorelasi dengan keterbatasan pemahaman kognitif warga terhadap sistem politik.
- b. Budaya Politik Partisipan melalui Modal Sosial: Sebagai antitesis dari realitas transaksional, Desa Ngadas memberikan gambaran budaya politik partisipan yang kuat. Partisipasi di desa ini tidak digerakkan oleh materi, melainkan oleh modal sosial yang mencakup kepercayaan (trust), norma adat yang mengikat, serta jaringan sosial yang kuat antara pemimpin dan warga. Keberhasilan politik non-transaksional di Ngadas membuktikan bahwa modal sosial dapat lebih berpengaruh dibandingkan modal finansial dalam menciptakan demokrasi yang berkeadilan

Analisis Hambatan Partisipasi Demokrasi Lokal

Data yang direduksi menunjukkan tiga hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi demokrasi di tingkat desa:

- a. Hambatan Struktural dan Gender: Partisipasi perempuan masih tergolong rendah, dengan keterwakilan dalam struktur pemerintahan desa secara nasional hanya sekitar 20%. Di Desa Mane Kareung, norma sosial dan budaya yang kental sering kali menempatkan perempuan pada posisi sosial yang lebih rendah, sehingga membatasi keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan politik
- b. Praktik Klientelisme: Demokrasi di tingkat lokal sering kali terjebak dalam wacana transaksional yang berbasis pada hubungan patron-klien. Menurut Aspinall & Berenschot (2019), praktik ini memicu bengkoknya biaya politik dan meningkatkan potensi korupsi dalam tata kelola pemerintahan desa
- c. Kesenjangan Literasi dan Teknologi: Rendahnya literasi politik mengakibatkan apatisme masyarakat terhadap forum penting seperti Musrenbang. Selain itu, transformasi digital melalui e-government di wilayah seperti Desa Panimbang masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan infrastruktur dan resistensi budaya terhadap perubahan teknologi.

Strategi Meningkatkan Partisipasi Demokrasi Desa

Penyajian data menunjukkan beberapa strategi kunci yang efektif untuk mentransformasi budaya politik desa:

- a. Kepemimpinan Demokratis: Hasil penelitian di Desa Kampar menunjukkan adanya hubungan searah dan kuat ($R = 0,602$) antara kepemimpinan kepala desa dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kepala desa yang mampu memotivasi dan merangkul semua elemen masyarakat dalam musyawarah cenderung lebih berhasil meningkatkan keterlibatan warga secara aktif.
- b. Literasi Politik Holistik: Strategi peningkatan pemahaman melalui sepuluh pendekatan termasuk kerja sama pemerintah desa, pelibatan tokoh masyarakat, agen literasi mahasiswa

(KKN), dan pemanfaatan kearifan local yang menjadi solusi krusial untuk mengubah perilaku pasif masyarakat menjadi aktif.

- c. Digitalisasi Pemerintah Desa: Implementasi e-government (seperti di Desa Panimbang) terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Melalui platform digital, warga dapat memberikan masukan dan memantau kinerja aparatur desa secara langsung, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan public.
- d. Optimalisasi Modal Sosial: Penguatan jaringan sosial dan norma kerja sama (sebagaimana teori Putnam, 2000) sangat diperlukan sebagai benteng pertahanan terhadap penetrasi politik uang di tingkat akar rumput

PEMBAHASAN

Dinamika Budaya Politik Parokial dan Tantangan Demokrasi Transaksional

Analisis terhadap faktor sosiokultural menunjukkan bahwa budaya politik parokial masih menjadi hambatan fundamental dalam penguatan demokrasi di tingkat desa. Karakteristik masyarakat di wilayah pedesaan, seperti yang teramati di Desa Ciwaringin dan Desa Karampuang, ditandai dengan rendahnya kesadaran kognitif terhadap sistem politik dan kecenderungan untuk memandang politik sebagai urusan yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menciptakan ruang bagi meluasnya praktik demokrasi transaksional dan klientelisme. Sebagaimana dikemukakan oleh Aspinall & Berenschot (2019), demokrasi di Indonesia sering kali terjebak dalam pola pertukaran materiil (uang atau barang) untuk mendapatkan dukungan suara.

Fenomena "serangan fajar" di tingkat lokal menunjukkan bahwa pilihan politik warga sering kali tidak didasarkan pada visi-misi calon pemimpin, melainkan pada iming-iming finansial atau kedekatan patronase personal. Selain faktor budaya, tingkat sosial ekonomi yang rendah menjadi pemicu utama kerentanan masyarakat terhadap politik uang. Data dari Desa Karampuang dan Ciwaringin mengonfirmasi bahwa ketergantungan pada pendapatan musiman dan rendahnya tingkat pendidikan (mencapai 70-76% tidak tamat SD) memperlemah rasionalitas politik warga.

Dalam kondisi ekonomi yang sulit, bantuan materiil dari aktor politik sering kali dianggap sebagai "bantuan sosial" daripada pelanggaran etika demokrasi. Hal ini mempertegas bahwa tanpa adanya perbaikan pada literasi politik dan kesejahteraan ekonomi, budaya politik parokial akan terus melanggengkan siklus apatisme dan korupsi di tingkat akar rumput.

Modal Sosial sebagai Benteng Resistensi Politik Transaksional

Sebagai antitesis terhadap realitas transaksional, penelitian ini menemukan bahwa penguatan modal sosial merupakan instrumen krusial untuk membangun ketahanan demokrasi desa. Kasus di Desa Ngadas membuktikan bahwa keberadaan kepercayaan (trust), norma adat yang mengikat, dan jaringan sosial yang kuat mampu menekan praktik politik uang secara signifikan.

Sesuai dengan teori Putnam (2000), kepercayaan timbal balik antara pemimpin dan warga yang dibangun melalui interaksi personal yang intensif menciptakan kohesi sosial yang tinggi. Di Ngadas, masyarakat secara swadaya membiayai proses pemilihan dan meniadakan kampanye yang bersifat memecah belah, yang menunjukkan bahwa modal sosial dapat lebih berpengaruh daripada modal finansial. Sinergi antara norma kearifan lokal dengan integritas pemimpin desa mampu mentransformasi perilaku politik dari yang semula bersifat subjek menjadi partisipan. Oleh karena itu, optimalisasi jaringan sosial, baik jaringan internal kelompok maupun jaringan eksternal dapat menjadi strategi kunci untuk menstimulasi partisipasi kolektif yang berlandaskan pada komitmen pembangunan desa jangka panjang, bukan kepentingan materiil sesaat.

Peran Kepemimpinan Demokratis dan Inklusivitas Politik

Evaluasi terhadap efektivitas strategi partisipasi menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa yang demokratis memiliki korelasi kuat dengan tingkat keterlibatan warga dalam pembangunan. Temuan di Desa Kampar mengindikasikan bahwa gaya kepemimpinan yang mengedepankan musyawarah, keteladanan, dan keterbukaan secara signifikan meningkatkan motivasi masyarakat untuk berkontribusi dalam program desa ($R = 0,602$). Pemimpin yang mampu melakukan koordinasi

yang baik dan peka terhadap kebutuhan lingkungan dapat mereduksi hambatan komunikasi yang selama ini memicu apatisisme warga.

Namun, tantangan besar masih ditemukan pada aspek inklusivitas gender. Meskipun peran perempuan sangat penting bagi kualitas pemerintahan yang responsif, partisipasi mereka masih sering dibatasi oleh norma sosial dan struktural, terutama di wilayah dengan kekentalan budaya seperti Aceh. Data menunjukkan keterlibatan perempuan dalam struktur desa masih berada di kisaran 20-30%. Meskipun demikian, munculnya kepemimpinan perempuan di Desa Karampuang menandai pergeseran paradigma menuju demokrasi yang lebih inklusif. Dukungan melalui organisasi masyarakat sipil dan penguatan peran dalam forum seperti Musrenbang menjadi metode efektif untuk memastikan aspirasi perempuan terintegrasi dalam kebijakan publik

Strategi Literasi Politik dan Transformasi Digital Desa

Untuk mengatasi kesenjangan literasi, implementasi strategi literasi politik harus dilakukan melalui pendekatan yang holistik dan kreatif. Pemanfaatan sepuluh jalur pendekatan yang dimulai dari kerja sama pemerintah desa, pelibatan tokoh agama (ulama), agen literasi mahasiswa (KKN), hingga penggunaan media sosial dapat menjadi solusi untuk mengubah perilaku pasif masyarakat menjadi aktif.

Literasi yang baik memungkinkan warga memahami hak mereka dalam politik anggaran dan pengawasan Pembangunan. Sejalan dengan itu, transformasi digital melalui e-government (sebagaimana diterapkan di Desa Panimbang) menawarkan mekanisme transparansi yang inovatif. Platform digital tidak hanya mempermudah layanan publik, tetapi juga menyediakan "jejak digital" yang memperkuat akuntabilitas keuangan desa dan mengurangi peluang Korupsi.

Sinergi antara literasi politik yang masif dan keterbukaan informasi berbasis teknologi dapat merobohkan struktur hierarki tradisional yang selama ini menghambat transparansi. Dengan demikian, ekosistem demokrasi lokal yang sehat dapat terwujud apabila strategi penguatan sosiokultural (modal sosial dan kepemimpinan) didukung oleh sistem tata kelola yang modern dan akuntabel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap dinamika politik di tingkat lokal, dapat disimpulkan bahwa penguatan demokrasi desa masih menghadapi tantangan fundamental berupa dominasi budaya politik parokial. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya kesadaran kognitif warga terhadap sistem politik, di mana masyarakat cenderung pasif atau hanya mengikuti instruksi otoritas lokal tanpa memahami substansi kebijakan publik secara mendalam. Permasalahan ini diperparah oleh meluasnya praktik politik uang dan pola hubungan patronase (klientelisme) yang melanggengkan "demokrasi transaksional"; dalam ekosistem ini, suara pemilih sering kali ditukar dengan iming-iming materiil atau kedekatan personal, yang pada akhirnya merusak rasionalitas pemilih dan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan. Di sisi lain, hambatan sosial dan struktural tetap menjadi kendala bagi terciptanya demokrasi yang inklusif, terutama bagi kelompok perempuan yang partisipasinya dalam pengambilan keputusan sering kali dibatasi oleh norma budaya dan tradisi patriarki yang masih kuat. Selain itu, kesenjangan literasi politik serta teknologi menghambat efektivitas partisipasi warga, di mana keterbatasan infrastruktur dan resistensi budaya terhadap transparansi digital (e-government) membatasi akses masyarakat untuk mengawasi tata kelola pemerintahan desa secara akuntabel.

Saran

Sebagai strategi penguatan, penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi modal sosial yang terdiri dari kepercayaan (trust), norma, dan jaringan, merupakan instrumen vital untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap penetrasi politik transaksional. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada peran kepemimpinan kepala desa yang demokratis, yang terbukti mampu menstimulasi partisipasi aktif warga melalui musyawarah yang inklusif dan transparan. Selain itu, implementasi literasi politik melalui pendekatan holistik yang meliputi kolaborasi dengan tokoh

masyarakat, agen literasi mahasiswa, dan pemanfaatan kearifan local yang menjadi solusi kunci untuk mengubah perilaku politik masyarakat dari parokial menjadi partisipan.

Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan bagi pemerintah desa adalah perlunya mengintegrasikan program literasi politik yang masif dengan transformasi digital tata kelola desa untuk menciptakan ekosistem demokrasi lokal yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada substansi kebijakan demi keberlanjutan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. (2012). Pengantar administrasi pembangunan: Konsep, teori, dan implikasinya di era reformasi. Alfabeta
- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press
- Almond, G. A., & Verba, S. (1990). *Budaya politik: Tingkah laku politik dan demokrasi di lima negara*. Bumi Aksara
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Pemilihan umum, klientelisme, dan negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan desa*. BPS Indonesia
- Chambers, R. (1996). *PRA: Participatory rural appraisal, memahami desa secara partisipatif*. Kanisius
- Darajat, D. M., & Muhtadi. (2020). Strategi literasi politik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa. *Sosio Informa*, 6(3), 305–317
- Desa Panimbang. (2025, 23 Mei). *Transformasi digital Desa Panimbang: E-government untuk transparansi dan keikutsertaan warga*. Artikel Desa Panimbang
- Eti, R. H. (2018). Pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(3)
- Fossati, D., Aspinall, E., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case. *Electoral Studies*
- Iskandar. (2023). Partisipasi perempuan dalam organisasi masyarakat sipil di Aceh. *Jurnal Ilmu Politik*
- Majidah, I., & Anjar, A. (2022). Tipe-tipe budaya politik di kalangan siswa/siswi IPS. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(2), 363–371. <https://doi.org/10.23887/jipp.v6i2.44119>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications
- Murdianto, R., Alamsyah, M. N., & Sisrilnardi. (2025). Demokrasi deliberatif dalam musyawarah rencana pembangunan desa di Desa Kayu Agung Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(4), 204–216. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jsip/article/view/2322>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster
- Rati, E. A., Chotimah, U., & Alfiandra. (2017). Pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Sako Makmur Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 4(1)

Saputri, J. (2022). Pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]

Surbakti, R. (1992). Memahami ilmu politik. Grasindo

Suwarsono, H. (2025). Budaya politik: Partisipasi masyarakat Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. *Amandemen*, 2(2), 127–142. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.916>

Syahir, R. F., Fauzi, M. P., Indira, M., Adrian, W. R., & Solihah, R. (2023). Urgensitas modal sosial dalam mengantisipasi politik transaksional: Studi kasus penyelenggaraan pilkades di Desa Ngadas Kabupaten Malang. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal (JDPL)*, 5(6), 85–102

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia

Yusuf, M. (2016). Perkembangan budaya politik di Indonesia. *Jurnal Serambi Ilmu*, 17(1). <https://doi.org/10.32672/si.v11i1.218>